



## UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id https://ipwija.ac.id

UNIVERSITAS IPWIJA

### FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)

**NO. 33 A/IX/Internal/LP2M/2024**

1. Judul PKM : Narasumber kegiatan Finalisasi Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN 2025
2. Nama Mitra Program
  - a. PKM (1) : Komite IV, DPD RI
  - b. PKM (2) :
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama : Inti Nuswandari, MM
  - b. NIDN : 0319067501
  - c. Golongan/Jabatan : Lektor (200)
  - d. Program Studi : Manajemen S1
  - e. Bidang Keahlian : Manajemen
  - f. Telp/surel : 087870213019/inti\_endratmo@yahoo.com
4. Anggota Tim Pengusul
  - a. Jumlah Anggota : -
  - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : -
  - c. Nama Anggota II/bidang keahlian : .....
  - d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : ..... orang
  - e. Nama Mahasiswa/wi : .....
  - f. Nama Mahasiswa/wi : .....
  - g. Telp/surel : .....
5. Lokasi Kegiatan/Mitra 1 : Ruang Sriwijaya lantai 2, DPD RI. Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta
  - a. Wilayah Mitra : Jakarta
  - b. Kabupaten/Kota : Jakarta
  - c. Propinsi : DKI Jakarta
  - d. PIC Mitra : .....
  - e. Telp/surel : (021) 57897358
6. Luaran yang dihasilkan : Rekomendasi dan Pertimbangan atas RUU APBN 2025
7. Jangka waktu pelaksanaan : Hari Selasa, 3 September 2024
8. Jenis Kegiatan : Diskusi
9. Tingkat wilayah : Lokal
10. Dana : Rp. 1.500.000,-
11. Sumber Dana : Komite IV DPD RI

Jakarta, 28 Agustus 2024

(Inti Nuswandari, MM.)

Menyetujui,

(R. Fadjar Darmananto, S.E.,M.M.)



## UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : [contact@ipwija.ac.id](mailto:contact@ipwija.ac.id) <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

### SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 144/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Ganjil 2024/2025 No.142/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024 tanggal 2 September 2024 dan surat permohonan dari Komite IV DPD RI No. LG.02/441/DPDRI/IX/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:


Hari / tanggal : Selasa, 3 September 2024  
Waktu : 10.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Sriwijaya lantai 2, DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta.  
Tema : "RUU APBN 2025 Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 September 2024



  
Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.

Kepala LP2M Universitas IPWIJA



## UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/C/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13740 Telp. 021-22819921

E-mail : [contact@ipwija.ac.id](mailto:contact@ipwija.ac.id) <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

**PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN**  
**UNIVERSITAS IPWIJA**  
**No. 146/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024**

1. Nama Kegiatan : Finalisasi Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN 2025
2. Jenis Kegiatan : Insidental
3. Tema : RUU APBN 2025 Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Mitra : Komite IV DPD RI
5. Cakupan wilayah : Lokal
6. Narasumber/Pendamping :
  - a. Ketua : Inti Nuswandari  
NIDN: 0319067501
  - b. Anggota 1 :  
NIDN:
  - c. Anggota 2 :  
NIDN:
  - d. Anggota 3 :  
NIDN:
7. Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil TA 2024/2025
8. Jangka Waktu Penugasan : ..... tahun /..... Semester (untuk terjadwal)
9. Lokasi : Jakarta
10. Dana :
  - a. Jumlah : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Sumber : Dana pihak ketiga (Komite IV DPD RI)
11. Hasil Kegiatan : Rekomendasi

Jakarta, 5 September 2024

Menyetujui dan Mengesahkan



**Dr. Ir. Titing Widyastuti, MM.**  
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : LG.02/441/DPDRI/IX/2024  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Ibu Inti Nuswandari SE., MM**  
**Dosen Universitas IPWIJA Jakarta**  
di  
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindaklanjut Rapat Kerja Komite IV bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik, dengan agenda Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Pimpinan dan Anggota Komite IV akan melaksanakan Rapat Finalisasi, maka Bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 3 September 2024  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sriwijaya Lt. 2, Sekretariat Jenderal DPD RI  
Jl. Gatot subroto No. 6, Jakarta

Koordinasi lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dapat dikomunikasikan dengan Sekretariat Komite IV DPD RI kepada Sdr. Samekto Ambinonuso melalui nomor +62 82130083097 atau melalui email: [komite4@dpd.go.id](mailto:komite4@dpd.go.id).

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Ibu, kami sampaikan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian  
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.  
NIP. 197702232002121004



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/LG.02/1251/DPDRI/IX/2024  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 6 September 2024

Kepada Yth.  
**Ibu Inti Nuswandari SE., MM**  
**Dosen Universitas IPWIJA Jakarta**  
di  
Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, tanggal 3 September 2024, kami Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian,  
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.  
NIP. 197702232002121004

## RUU APBN 2025 DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT <sup>1</sup>

Oleh: Inti Nuswandari, MM<sup>2</sup>

### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan perkembangan kinerja perekonomian lima tahun terakhir dan mencermati perubahan mendasar di tahun 2024 dan 2025 sebagai periodisasi presiden terpilih serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan meskipun perkiraan pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan positif antara 5.1%-5.5% pada tahun 2025.

**Tabel 2.1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022-2025**

No	Indikator	Realisasi		APBN 2024	Asumsi 2025		
		2022	2023		KEM-PPKF	RAPBN	Puskadaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5.3	5.05	5.2	5.1-5.5	5.20	5.25
2	Inflasi (%yoy)	5.5	2.61	2.8	1.5-3.5	2.50	4.00
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7.0	6.68	6.7	6.9-7.3	7.10	5.82
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14,871	15,225	15,000	15,300-16,000	16,100	14,500
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	97	78.43	80	75-85	82.00	65
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	612	605.50	625	580-601	600	720
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	954	960.40	1,033	1,003-1,047	1,005	993

Sumber: KEM-PPKF 2025, Nota Keuangan 2025 dan Puskadaran 2024

<sup>1</sup> Disampaikan dalam kegiatan Finalisasi Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2025

<sup>2</sup> Dosen Universitas IPWIJA, Jakarta

Mengacu pada target dan arah kebijakan dalam RKP 2025 serta KEM-PPKF 2025, Pemerintah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berkisar antara 5.1%-5.5%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih cukup realistis, karena Menurut BPS (2024) Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp3.112,9 triliun, lebih lanjut dijelaskan bahwa Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5.11% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24.29%. Di KEM-PPKF 2025, tingkat inflasi ditetapkan pemerintah berkisar antara 1.5%-3.5%, dan dalam RAPBN adalah sebesar 2.5%, sementara puskadaran memperkirakan Tingkat inflasi akan lebih tinggi dari target pemerintah yang mencapai sebesar 4%. Hal ini diduga karena akan terjadinya kenaikan harga-harga pangan yang diatur pemerintah. Dalam catatan BPS, (2024) bahwa Juli 2024 telah terjadi inflasi *year-on-year* (y-ony) sebesar 2,13% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09.

Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09% dengan IHK sebesar 110,80 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84% dengan IHK sebesar 103,54. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,68% dengan IHK sebesar 108,77 dan terendah terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,46% dengan IHK sebesar 101,63. Sementara deflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,25% dengan IHK sebesar 104,06 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 104,77.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3.66% kelompok kesehatan sebesar 1.77% dan kelompok transportasi sebesar 1.22%

Pendapatan negara pada tahun 2025 diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan berkat kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan yang terus diperkuat oleh pemerintah. Proyeksi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Berdasarkan RAPBN 2025, pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp2.996,87 triliun, meningkat 6,9% dari *outlook* tahun 2024.

Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.613,1 T dirancang dengan tujuan strategis untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, belanja negara pada RAPBN 2025 dibuat untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan investasi jangka panjang, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan keberlanjutan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola belanja negara secara efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

## **II. REKOMENDASI**

1. Pemerintah agar dalam melakukan akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM lokal melalui program pelatihan vokasional yang



sesuai dengan kebutuhan industri di daerah, dengan tetap memperhatikan pembangunan Kawasan Barat Indonesia.

2. Pemerintah agar mendorong pengembangan iklim investasi di daerah dengan memberikan insentif yang tepat, memperbaiki infrastruktur dasar, dan menyederhanakan regulasi sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan antar-wilayah.
3. Dalam pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait untuk fokus meningkatkan hasil pangan seperti pengadaan bibit unggul.
4. Pemerintah perlu fokus pada strategi diversifikasi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka diversifikasi sumber penerimaan pajak dan reformasi penilaian objek pajak.
5. Pemerintah agar regulasi atau Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diterbitkan pada awal tahun anggaran berjalan sehingga DAK dapat terserap secara optimal.
6. RAPBN 2025 agar diarahkan pada penguatan Pemda untuk pengembangan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) serta pemerintahan desa.
7. Perlu adanya peningkatan anggaran dana desa yang lebih signifikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di Desa, termasuk meningkatkan program dan kegiatan terkait efektivitas kerja sama desa dan kawasan perdesaan.
8. Pemerintah agar melakukan Evaluasi terhadap Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pelayanan

Publik birokrasi pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat fungsionalisasi Aparat Sipil Negara.

9. Pemerintah harus memastikan agar program Makan Bergizi Gratis tepat sasaran dan tetap menjaga porsi anggaran Pendidikan 20%, agar kualitas dan program penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal.
10. Perlu adanya transparansi alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN 2025 serta alokasi belanja lain-lain tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
11. Perlu adanya ketegasan norma yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan di tingkat pusat seluruhnya berada dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar anggaran pendidikan lebih difokuskan pada pengembangan program pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
12. *Mandatory spending* anggaran kesehatan 5% dari APBN agar tetap dijaga dan diberlakukan, tidak disatukan dengan anggaran fisik, belanja pegawai maupun janji program pemerintah berikutnya terkait makan siang gratis.
13. Kebijakan anggaran Kesehatan tahun anggaran 2025 agar dapat mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta JKN, menguatkan dukungan dan peran Pemda serta Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta memperkuat industri farmasi nasional yang dapat berdaya saing dengan produk impor dan menghindari ketergantungan dengan produk luar
14. Kebijakan anggaran Perlindungan Sosial tahun anggaran 2025 agar mengarahkan pada adanya penguatan program kartu kesejahteraan, pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data, meningkatkan konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial

dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2, serta penguatan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan, seperti program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin.

15. Pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan berimbang antara pusat dan daerah terkait dengan penegakan hukum dan pengelolaan sektor kehutanan, terutama daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tinggi.

---